

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAMPUNG WISATA TABLANUSU KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA: Kajian Pariwisata Budaya

Ika Pujiningrum Palimbunga

sur-el: ika.palimbunga@gmail.com

Program Magister Pariwisata PPS Universitas Udayana – Bali

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi, faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi dan mengetahui dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat Kampung Tablanusu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Kampung Tablanusu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi dan teori *Community Based Tourism*.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bentuk partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terbagi menjadi dua yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah golongan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan sedangkan faktor eksternal yaitu lokasi tempat bekerja, kondisi tempat bekerja dan kebijakan pengelola.

Kata Kunci: *bentuk, partisipasi, pengembangan, pariwisata, dan kampung Tablanusu*

Abstract

The purpose of this study was to identify the forms of participation, supporting factors and inhibiting factors of participation and to know the impact of tourism development on Tablanusu village community.

This research uses qualitative descriptive method, with data collection technique through observation, interview, and document study. This research was conducted in Kampung Tablanusu. Informants in this study amounted to 17 people selected by purposive sampling technique. The theory used is the theory of participation and theory of Community Based Tourism.

The results of this study reveal the form of participation in the planning, implementation, and supervision phases. Factors that influence participation are divided into two factors: the driving factors and the inhibiting factors. Factors that encourage participation are internal factors and external factors. Internal factors are age group, education level, occupation type and income level whereas external factors are location of work place, work condition and management policy.

Keywords: *form, participation, development, tourism, and Tablanusu village*

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*. Dalam hal ini, masyarakat lokal yang membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Sunaryo, 2013).

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya alam yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi objek wisata. Selain itu, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan usaha pengembangan pariwisata sangat penting, sehingga dari masyarakat itu sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan desa wisata, agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, sehingga dalam pengelolaan pariwisata akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera seiring dengan kelestarian alam. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Wujud partisipasi masyarakat terkait yaitu mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

Pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nasikun (1997:26) bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat memiliki ciri-ciri atau karakteristik sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas daerah dan sumber daya masyarakat lokal seperti: (1) berskala kecil sehingga lebih mudah diorganisasikan, contohnya; penginapan atau akomodasi non bintang yang sumber daya manusianya tidak dituntut harus memiliki sertifikat khusus. Akomodasi berupa *homestay* umumnya dilengkapi dengan fasilitas yang sederhana dan pelayanannya yang bersifat kekeluargaan, (2) lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat lokal. Pembangunan fasilitas pariwisata dengan menggunakan arsitektur lokal lebih dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat lokal daripada bangunan fasilitas pariwisata yang diadopsi dari daerah luar, (3) lebih memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi mulai dari proses perencanaan, pengembangan dan evaluasi, dan (4) budaya partisipasi masyarakat lebih diutamakan, pembangunan yang berpihak kepada rakyat yang menjadi tuan rumah, dan untuk keberlanjutannya sosial budaya masyarakat lokal.

Papua adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia yang memiliki kekayaan alam mineral baik itu tembaga, nikel dan emas. Selain kekayaan alam mineral, Papua juga memiliki keindahan pesona alam yang menakjubkan yang perlu dikelola dengan baik. Keindahan alam ini memiliki daya tarik yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata di Papua. Salah satu kabupaten yang sedang mengembangkan pariwisatanya adalah Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan dengan suku dan bahasa yang berbeda. Dari keanekaragaman suku dan bahasa yang ada mencerminkan adanya budaya yang masih melekat di kalangan masyarakat lokal. Pariwisata mulai berkembang di salah satu kampung yang telah dijadikan

destinasi wisata yakni, “Kampung Tablanusu” yang diartikan dalam bahasa daerah disebut sebagai “matahari terbenam”. Keanekaragaman dan keunikan alam dan budaya yang terdapat di Kampung Tablanusu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata (Yarisetouw, 2012).

Kurangnya sumber daya manusia yang berpotensi dalam bidang pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu tentunya berdampak pada partisipasi masyarakat. Pengetahuan tentang pariwisata yang masih terbatas serta keterbatasan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan tentang pariwisata sehingga sebagian masyarakat hanya dapat bekerja di sektor informal seperti berdagang, menyediakan jasa perahu untuk penyebrangan dan aktivitas informal lainnya. Dengan adanya kesadaran dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang pariwisata tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu.

Upaya-upaya pengembangan yang berlangsung di kawasan Kampung Tablanusu diorientasikan pada masyarakat lokal. Hal ini yang terjadi di kawasan wisata Kampung Tablanusu, namun masyarakat masih minim dalam kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat dengan keterbatasan secara finansial dan pengetahuan tentang pariwisata sehingga masyarakat terlibat dalam partisipasi di sektor informal. Beberapa upaya terus dilakukan oleh pihak pengelola dan pihak pemerintah untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung pengembangan serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan Kampung Wisata Tablanusu.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa saat ini pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu sudah melibatkan partisipasi masyarakat lokal Kampung Tablanusu namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan, nampaknya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kampung Tablanusu terutama berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat, motivasi masyarakat dan dampak-dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal di Kampung Tablanusu perlu lebih dioptimalkan lagi, dengan dasar pemikiran bahwa sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kepariwisataan di Kampung Tablanusu dengan mengacu pada konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu sangat penting diteliti terutama dengan menekankan penelitian tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor apa yang memotivasi partisipasi masyarakat serta bagaimana dampak-dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat Kampung Tablanusu.

Mengacu pada fakta-fakta di atas, maka tulisan ini berupaya mendeskripsikan tentang pengembangan pariwisata dengan judul: “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Papua: Kajian Parawisata Budaya.”

KONSEP DAN KERANGKA TEORETIS

Partisipasi Masyarakat

Secara umum konsep dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Hal ini berarti memberikan kesempatan dan

wewenang kepada masyarakat untuk aktif mengelola sumber daya yang ada, mengelola kemampuan mereka sendiri, menjadi subyek bukan sebagai obyek dalam pembangunan, berperan aktif dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang mempengaruhi tempat itu.

Menurut Sumarto (2003) bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat; sedangkan menurut Pitana (2002:56) menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan "*genuine participation*" atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata.

Jadi berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dengan ikut berperan aktif dalam pengembangan di suatu destinasi wisata. Partisipasi yang ada sebagai wujud pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat mengembangkan potensi yang ada di daerah mereka tinggal.

Untuk itu, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Partisipasi tersebut merupakan sebuah tujuan dalam proses demokrasi yang berarti berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat, dengan demikian partisipasi sebagai wujud pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat mengembangkan potensi yang ada di suatu destinasi.

Pengembangan Pariwisata

Pariwisata dipandang sebagai sumberdaya ekonomi yang potensial. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya misalnya: sektor industri, sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor primer lainnya, pariwisata memiliki banyak keunggulan di antaranya: pengembangan pariwisata merupakan hal yang dapat dilaksanakan dengan waktu yang paling cepat dengan metode yang paling mudah dan sederhana. Selain itu pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat sehingga banyak pihak dapat menikmati manfaatnya dan juga dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya dan sosial masyarakat.

Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, tetapi juga yang berkompotensi menengah dan rendah. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebagai contoh untuk sektor pertanian, terkendala masalah keberlanjutan lahan dan akses terhadap pasar. Untuk pertambangan, kendala yang dihadapi adalah bahwa deposit akan habis dan bisa berdampak buruk pada alam dan masyarakat. Sebaliknya pengembangan pariwisata dalam hal ini menawarkan cara yang tepat untuk membangun industri pendukung seperti hotel, restoran, penyewaan bus wisata, penyewaan perahu, industri cinderamata dan lain-lain (Wardiyanto, 2010:9).

Pengembangan pariwisata di suatu destinasi membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun sebaliknya, jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik maka membawa kerugian atau berdampak negatif bagi *stakeholder* maupun daerah tempat pariwisata berkembang.

Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mendukung konservasi lingkungan, situs arkeologis dan sejarah, serta arsitektural, meningkatkan kualitas lingkungan, infrastruktur yang dikembangkan untuk mendukung pariwisata tidak merusak lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas bagi masyarakat lokal, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat setempat baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yaitu proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi, sempurna dan berguna. Adanya pengembangan dapat juga mengembangkan pelayanan yang berkualitas terhadap pengembangan yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan dan masyarakat lokal yang tentunya tetap memperhatikan aspek budaya, sosial, sejarah, lingkungan dan ekonomi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengembangan pariwisata yaitu proses pengembangan yang membawa perubahan bagi suatu destinasi melalui prosedur yang benar dan perencanaan yang matang sehingga pariwisata di suatu destinasi dapat berkembang. Demikian halnya pengembangan akan memberikan manfaat seperti diversifikasi usaha, memperluas kesempatan kerja, peningkatan pelayanan transportasi, pengembangan wawasan sosial dan peningkatan infrastruktur bagi destinasi tersebut. Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan juga kepada wisatawan.

Kampung Wisata

Kampung wisata adalah salah satu ungkapan kehidupan manusia yang menyuguhkan tujuan wisata perdesaan. Dalam perwujudannya, kampung wisata hendaknya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada baik yang menyangkut fasilitas wisata, sirkulasi, dan pengolahan ruang luar yang memiliki banyak keanekaragaman. Daerah tujuan wisata adalah kawasan atau daerah tertentu yang memiliki potensi seperti atraksi dan objek-objek wisata yang ditunjang oleh hubungan lalu lintas, fasilitas kepariwisataan dan usaha-usaha pariwisata serta masyarakat menjadi kebutuhan wisatawan.

Kampung wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Perkembangan kampung/desa wisata di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dikarenakan banyaknya wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata alam.

Usaha pemberdayaan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan kepariwisataan adalah dengan diimplementasikannya konsep pariwisata berbasis masyarakat. Salah satu bentuk dari pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata perdesaan, yang didorong oleh pemerintah dalam rangka untuk diversifikasi pendapatan pada masyarakat dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Dengan pariwisata perdesaan atau perkampungan dapat diperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penduduk kampung karena masyarakat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan.

Kampung wisata merupakan pengembangan suatu kampung dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat kampung yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema. Di dalam kampung tersebut harus juga mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan suatu perjalanan wisata, baik dari aspek

daya tarik maupun berbagai fasilitas pendukungnya. Unsur-unsur yang diperlukan untuk menjadi desa wisata yaitu memiliki potensi wisata dan budaya yang khas, lokasi kampung masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya, adanya aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung program desa wisata serta terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan (bdk.Agus, 2006).

Dari pandangan-pandangan kampung wisata di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kampung yang dapat dikembangkan sebagai kampung wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang mencerminkan keaslian perkampungan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat dan potensi alam serta budaya. Potensi yang ada di suatu kampung memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat lokal dan dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Kampung Tablanusu

Kondisi kampung-kampung di Papua cukup beragam secara fisiografi, suku dan interaksi sosial masyarakatnya. Kebijakan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua, mengisyaratkan bahwa dalam lima tahun ke depan pembangunan akan dimulai dari kampung. Hal ini merupakan terobosan penting dalam pembangunan masyarakat terutama di Kampung Wisata Tablanusu. Kampung Tablanusu yang terletak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, yang menjadi objek utama kampung wisata ini adalah Pantai Tablanusu. Kampung ini memiliki luas sekitar 230,5 hektar yang didiami sepuluh suku, yaitu Suku Sumile, Danya, Suwae, Apaserai, Serantow, Wambena, Somisu, Selli, Yufuwai, dan Yakarimilena. Sejak Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah menetapkan sebagai kampung wisata. Sejak itulah kampung ini ramai dikunjungi masyarakat untuk berbagai kegiatan, seperti bertamasya maupun berkemah di tepian pantai (Jane, 2009).

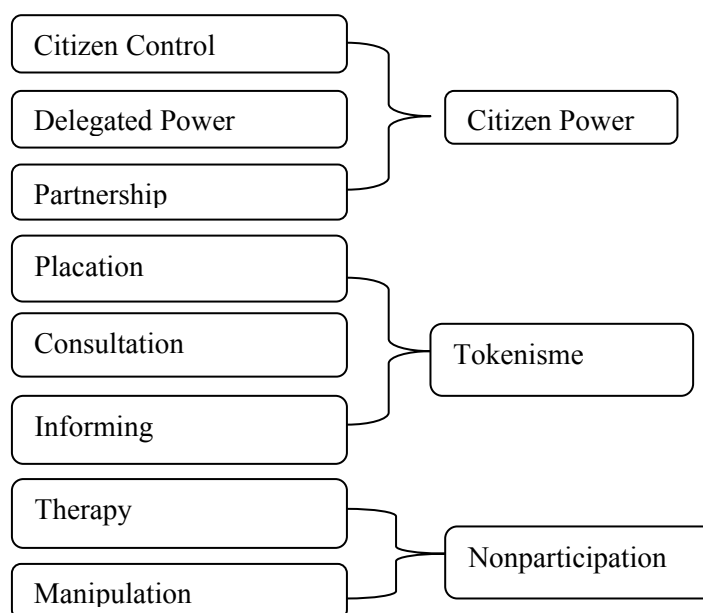
Kampung Tablanusu dijadikan salah satu desa wisata karena memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor lainnya. Potensi yang dimiliki antara lain: keunikan alam, adat istiadat, flora dan fauna, bahasa serta budaya. Wisatawan dapat menikmati wisata hutan, wisata pantai, wisata telaga air tawar, wisata sejarah, dan wisata budaya. Keunikan Kampung Wisata Tablanusu ini adalah seluruh wilayahnya diselubungi batu koral hitam (Kompasiana, 2012).

Kampung Tablanusu dijadikan sebagai kampung wisata karena memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut: (1) aksesibilitas menuju destinasi kampung Wisata Tablanusu mudah dijangkau oleh wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi, (2) memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata, (3) masyarakat dan aparat kampung menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap kampung wisata serta para wisatawan yang datang ke lokasi wisata, (4) jaminan keamanan di kampung wisata bagi wisatawan, (5) tersedia akomodasi, dan tenaga kerja yang memadai, (6) Kampung Tablanusu berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti Kampung Tablanupa, Pantai Amai, dan Pantai Harlem (Isabella, 2010). Batas-batas wilayah Kampung Tablanusu adalah (a) Sebelah Utara : Samudera Pasifik, (b) Sebelah Selatan: Kampung Waiya, (c) Sebelah Barat: Kampung Kendate, dan (d) Sebelah Timur: Kampung Tablasupa.

Teori Partisipasi

Arnstein (1969) merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (*agency*). Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*),

Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi, setiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), meliputi: (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*therapy*). (3) menginformasikan (*informing*), (4) konsultasi (*consultation*), dan (5) penentraman (*placation*), ketiga tangga menggambarkan tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Tangga ke (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian wewenang (*delegated power*), dan (8) pengendalian masyarakat (*citizen control*). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. Perhatikan bagan di bawah ini.



Bagan 1. Tangga partisipasi menurut Arnstein

Sumber : Arnstein (1969)

Bagan tangga partisipasi menurut Arnstein (1969) di atas dapat diuraikan secara berjenjang dari bawah ke atas sebagai berikut. *Pertama*, manipulasi (*manipulation*). Pada tangga partisipasi ini relatif tidak ada komunikasi dan dialog, tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik partisipan. *Kedua*, terapi (*therapy*). Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat tokenisme, peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. *Ketiga*, informasi (*information*). Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*). *Keempat*, konsultasi (*consultation*). Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi

belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. *Kelima*, Penentruman (*placation*). Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi di mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. *Keenam*, kemitraan (*partnership*). Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan. *Ketujuh*, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*). Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. *Kedelapan*, Pengendalian warga (*citizen control*). Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

Teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Dalam pengembangan pariwisata yang berbasiskan masyarakat, kegiatan masyarakat berbaur dengan kegiatan pariwisata sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan sebagai objek dan daya tarik pariwisata tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut. Natori (2001:5) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat sebagai berikut:

“Activities of the local community to promote exchange and to create a community filled with energy by fully harnessing nature, culture, history, industry, talented people and other local resources” (Aktivitas masyarakat setempat untuk mempromosikan pertukaran dan untuk menciptakan sebuah komunitas yang penuh dengan energi oleh alam sepenuhnya, pemanfaatan budaya, sejarah, industri, orang-orang yang berbakat dan sumber daya lokal lainnya).

Pariwisata berbasis masyarakat difokuskan pada keseimbangan dan keharmonisan di antara lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dijiwai dengan pemanfaatan kearifan lokal sebagai daya tarik wisatanya, memelihara lingkungan tetap lestari, mencintai budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pengembangan sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Pitana, 1999a:78).

Tujuan utama pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yaitu: pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kecintaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara membagi ilmu dan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat lainnya. Kedua, yaitu bertujuan untuk melestarikan berbagai asset budaya, sejarah dan kekayaan alam sehingga tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Adanya keunggulan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yaitu adanya penciptaan lapangan kerja yang luas untuk kalangan masyarakat, pendukung kelestarian budaya, adanya upaya pelestarian sumber daya masyarakat setempat, dan keuntungan ekonomi yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat lokal. Selain itu pariwisata berbasis masyarakat memiliki

kelemahan, yaitu masyarakat lokal tidak memiliki visi dan misi dalam perencanaan jangka panjang dan tidak memiliki cukup modal untuk membangun secara cepat. Kelemahan ini mencerminkan ketidakmampuan masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata karena kurangnya pengetahuan, pengalaman serta keahlian dalam bidang pariwisata (Pitana, 1996b:67)

Pariwisata berbasis masyarakat berfokus memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai pengembangan daya tarik wisata di suatu destinasi. Dengan adanya pengembangan suatu daya tarik wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam beberapa aspek meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu, pengembangan pariwisata yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat dalam bidang perekonomian terutama bagi masyarakat lokal yang berada pada kawasan tersebut. Masyarakat lokal yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi serta segala upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendapat pengalaman yang dibutuhkan. Dengan pengetahuan dan pengalaman maka masyarakat memiliki kesempatan dan kesadaran untuk mengembangkan berbagai hal yang terkait tentang keramahan lingkungan, dari sudut pandang sosial budaya dan keagamaan sehingga semuanya tercapai selaras.

Prinsip dasar *Community Based Tourism* yaitu membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan suatu daya tarik wisata, dengan ikut berpartisipasi, masyarakat lokal ikut mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomis dari partisipasi mereka, selain itu masyarakat lokal ikut bertanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan sumber daya pariwisata yang ada di kawasan daerah tempat mereka tinggal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data penelitian, dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu jenis data yang terdiri dari data kualitatif dan sebagai pendukung data kuantitatif. Sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Data Kualitatif, dan (2) Data Kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka tetapi data tersebut dapat diuraikan secara rinci dan jelas. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Tablanusu serta sarana prasarana fasilitas umum yang menunjang pariwisata, sedangkan data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang terkait dengan pengembangan Kampung Tablanusu di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa presentasi penduduk menurut lapangan pekerjaan, pertumbuhan wisatawan di Kampung Tablanusu, penduduk Kampung menurut tingkat pendidikan, dan rincian dana pemberdayaan Kampung Tablanusu.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut. Pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi langsung ke lokasi kampung wisata, penyebaran angket dan hasil wawancara dengan para informan

secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari pihak pertama melainkan dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini maupun dari dokumen dan arsip resmi, seperti data kunjungan wisatawan, data demografi dan etnografi serta informasi-informasi lainnya yang diperoleh dari berbagai lembaga atau instansi atau instansi terkait, berupa laporan-laporan.

Instrumen Penelitian

Sugiyono (2012:102) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur (Sugiyono, 2012:103).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari informan berupa: kamera, alat tulis, pedoman wawancara, dan alat perekam. Kamera dipergunakan untuk mendokumentasikan potensi yang dimiliki oleh Kampung Wisata Tablanusu, aktifitas yang berkaitan dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan aktifitas peneliti dalam menggali informasi terkait dengan judul penelitian ini. Alat tulis dipergunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan informan. Pedoman wawancara dipergunakan untuk menanyakan informasi secara mendalam kepada pemerintah, pengelola dan masyarakat. Alat perekam dipergunakan untuk mendukung hasil pencatatan dalam wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau *sampling* menurut Sugiyono (2012:137) merupakan “teknik pengambilan sampel”. Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data sebagai berikut. *Pertama*, observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan untuk memperoleh gambaran umum yang jelas mengenai potensi yang ada di Kampung Wisata Tablanusu, aktivitas partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sarana, dan prasarana wisata. Peneliti melakukan pengamatan, dan berperan sebagai observasi partisipatif, terlibat dalam kegiatan dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, dalam hal ini pengelola, perangkat kampung dan masyarakat (Sugiyono, 2012:145). *Kedua*, wawancara. Teknik wawancara adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2012:137). Wawancara dilakukan secara terbuka dengan bertanya langsung kepada informan kunci, yaitu pihak yang berkompeten yang dianggap dapat memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Wawancara menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, pihak pengelola, perangkat kampung, dan masyarakat lokal Kampung Wisata Tablanusu. *Ketiga*, dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder melalui dokumen – dokumen yang dimiliki oleh sumber data sekunder. Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi: Kepala Kampung Tablanusu, Kepala Distrik Depapre, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, dan referensi lainnya yang menunjang data primer.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian di lapangan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti dan ditafsirkan, termasuk menyusun, memanipulasi dan menyajikan supaya menjadi suatu informasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk pemecahan masalah tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata Kampung Tablanusu sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni analisis data yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan/melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan cara sistematis, faktual, dan akurat (Kusmayadi, 2000:29). Proses analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, sebagai berikut. *Pertama*, klasifikasi data. Hasil wawancara yang telah didapat, kemudian dipahami makna apa yang dimaksud dalam wawancara tersebut. Makna yang mendalam didapat melalui wawancara yang mendalam (Bungin, 2003). Data yang didapat tersebut kemudian dipilah-pilah, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. *Kedua*, interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan di lapangan untuk menjawab permasalahan serta upaya peneliti memaknai data yang dapat ditempuh dengan cara meninjau kembali gejala-gejala berdasarkan sudut pandangnya, perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan (misanya oleh peneliti lain). Kajian interpretasi ini melibatkan beberapa hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa diskusi, kesimpulan, dan implikasi seperti: masalah penelitian terjawab, refleksi peneliti terhadap makna data, pandangan peneliti yang dikontraskan dengan kajian literatur (teoretik), dan saran untuk penelitian selanjutnya. *Ketiga*, Penyajian data, menyajikan data yang telah diklasifikasikan melalui metode deskriptif atau penggambaran data secara narasi sehingga dapat dengan mudah dipahami. Sebelumnya data tersebut dianalisis, ditafsirkan, dan dimaknai. Penarikan kesimpulan, menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis secara cermat dan mendalam terhadap data yang diperoleh, sehingga terjawab permasalahan yang hendak diteliti.

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu. Berdasarkan hasil penelitian ini, terungkap bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Tablanusu terdiri dari: perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Bentuk partisipasi berupa keterlibatan masyarakat yang dimulai dari proses awal perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap program pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu. Partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu partisipasi masyarakat terkait dengan program-program didukung oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dan partisipasi masyarakat dalam sektor informal. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu dapat dijelaskan dalam beberapa tindakan atau kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam perencanaan antara lain: (1) menetapkan pasar sasaran,

merumuskan strategi untuk mencapai pasar sasaran tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan pasar sasaran, dan (2) keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis, dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas, dan sebagainya (Sunaryo, 2013:223).

Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Paradigma pembangunan yang baru telah menempatkan pendekatan perencanaan bersama masyarakat sebagai suatu kebutuhan mendasar dalam rangka proses pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak pembangunan, sudah seharusnya dilibatkan sejak tahap awal perencanaan hingga pada tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Distrik dan Kampung Kabupaten Jayapura dengan pendekatan Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM), masyarakat Kampung Tablanusu diikutkan dalam musyawarah. Upaya ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan yang dibuat sebagai program pengembangan desa yang mengikutsertakan segenap masyarakat Kampung Tablanusu untuk berpartisipasi secara aktif dan interaktif mengutarakan pendapat, ide-ide, saran serta keluhan dari masyarakat yang dianggap menjadi kendala untuk program pengembangan Kampung Tablanusu.

Menurut Ericson dalam Slamet (1994:89) menyatakan bahwa bentuk partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*) adalah pelibatan seseorang atau sekelompok orang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Partisipasi masyarakat Kampung Tablanusu pada tahap perencanaan, yaitu masyarakat diikutkan dalam musyawarah yang membahas aspirasi masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di kampung ini. Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat Kampung Tablanusu, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan para tokoh adat Kampung Tablanusu. Pada musyawarah ini masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan membentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Setiap kelompok yang terbentuk kemudian mengajukan usulan dan pendapat tentang kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan kampung yang didampingi oleh aparat kampung sebagai penasehat.

Pada tahap perencanaan terkait dengan program-program tahunan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung Tablanusu, dalam hal ini program-program yang terkait melibatkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dan masyarakat lokal Kampung Tablanusu.

Program-program tersebut terkait dengan program pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat lokal Kampung Tablanusu. Dinyatakan oleh kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua bahwa:

“Perencanaan pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu dibuat atas kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini masyarakat juga ikut memberikan aspirasi namun keputusan tetap diserahkan kepada pemerintah. Dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata difokuskan pada beberapa program yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal Kampung Tablanusu dan program-program yang bertujuan melibatkan partisipasi masyarakat Kampung Tablanusu (wawancara dengan Erick Ohee, 29 Maret 2015)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa program-program yang dirancang merupakan kesepakatan dari pemerintah dinas terkait yaitu adanya kerjasama antara pemerintah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura. Masyarakat diikutkan dalam musyawarah perencanaan pengembangan kampung, namun keputusan serta langkah selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat hanya sebatas memberikan ide, pendapat maupun saran pada musyawarah namun tidak ada jaminan bahwa pendapat serta saran masyarakat akan dipakai untuk membuat kebijakan. Dalam tahap perencanaan, pengembangan pariwisata difokuskan pada beberapa program yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan program-program yang bertujuan melibatkan partisipasi masyarakat Kampung Tablanusu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan program-program pengembangan pariwisata dianalisis dengan teori partisipasi menurut Arnstein (1969), kedelapan tipe tingkatan tersebut adalah tipe manipulasi (*manipulation*), tipe terapi (*therapy*), tipe menginformasikan (*informing*), tipe konsultasi (*consultation*), tipe penentruman (*placation*), tipe kemitraan (*partnership*), tipe pendelegasian wewenang (*delegated power*), dan tipe pengendalian masyarakat (*citizen control*).

Pada tahap perencanaan, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan saran untuk perencanaan program-program pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu namun keputusan tetap dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan berada pada tahapan terapi (*therapy*). Pada tahapan terapi (*therapy*) telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan (*Actuating*)

Partisipasi merupakan salah satu wujud dari keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sesuatu. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Tablanusu dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu.

Tabel 1. Program Pengembangan Pariwisata di Kampung Tablanusu

Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua	Tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Tahun
Sosialisasi sadar wisata	2011	Sosialisasi sadar wisata	2011
Pelatihan tata boga bagi ibu-ibu di Kampung Tablanusu	2011	Pelatihan pemandu wisata terpadu bagi pemuda pemudi	2010
Pelatihan pemandu wisata terpadu	2012	Pembangunan gudang penyimpanan alat selam, dan pemberian alat selam	2013
Pelatihanselam tingkat lanjutan	2013	Pelatihan selam tingkat lanjutan	2013
Pelatihan selam tingkat rescue	2014	Pelatihan selam tingkat rescue	2014

Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua	Tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Tahun
-	-	Pelatihan sapta pesona	2014
-	-	Pelatihan kuliner daerah	2014

Sumber: Hasil Observasi Palimbunga, 2015

Pada tabel 1 di atas, dapat dipaparkan beberapa program yang dirancang oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dengan kesepakatan segenap aparat kampung dan masyarakat Kampung Tablanusu adalah sosialisasi sadar wisata pada tahun 2011. Pelatihan tata boga bagi ibu-ibu di Kampung Tablanusu dilaksanakan dalam rangka memotivasi para ibu-ibu untuk mengolah kemampuan dan bakat yang ada dalam memasak. Program ini dilaksanakan agar ibu-ibu memiliki ide yang dapat dikembangkan sebagai potensi untuk mengembangkan partisipasi ibu-ibu dalam mengembangkan kuliner daerah. Pelatihan tata boga ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kesadaran bahwa kuliner merupakan salah satu usaha yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan sebagai bentuk upaya dalam pelestarian kuliner daerah Papua.

Program pelatihan pemandu wisata terpadu yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat lokal yang memiliki potensi sebagai pramuwisata. Pelatihan pemandu wisata dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat lokal dalam penerimaan wisatawan yang berkunjung ke Kampung Wisata Tablanusu. Pelatihan pemandu wisata ini diikuti oleh 25 orang masyarakat lokal mayoritas anggota pelatihan ini terdiri dari pemuda – pemudi yang dilatih berbahasa Inggris untuk mempersiapkan diri menyambut wisatawan mancanegara untuk kedepannya.

Program pelatihan selam tingkat lanjutan dan tingkat *rescue* yang diselenggarakan pada tahun 2013-2014 merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan potensi bagi masyarakat lokal. Tujuan utama dalam program ini yaitu memberikan pelatihan serta pengetahuan cara menyelam yang sesuai dengan prosedur yang benar. Dengan pelatihan ini, pemerintah dinas terkait mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat yang mengikuti pelatihan ini agar pelatihan yang dilakukan bermanfaat bagi kalangan luas. Pelatihan selam diikuti oleh pemuda-pemudi dengan jumlah 20 orang dan diharapkan juga setelah pelatihan selam ini memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk kemudian dapat menjadi pelatih selam ataupun instruktur selam bagi wisatawan yang membutuhkan jasa instruktur selam di Kampung Tablanusu.

Program yang dirancang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dengan kesepakatan masyarakat lokal Kampung Tablanusu adalah program sosialisasi sadar wisata, pelatihan pemandu wisata terpadu bagi pemuda pemudi di Kampung Tablanusu. Pelatihan pemandu wisata yang diikuti oleh pemuda-pemudi dari Kampung Tablanusu bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menciptakan lapangan kerja baru dibidang pariwisata. Pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura melaksanakan pembangunan gudang penyimpanan alat selam dan pemberian alat selam kepada pihak aparat kampung dengan tujuan peralatan selam yang diberikan tersebut bermanfaat bagi masyarakat sebagai peluang usaha kerja baru di destinasi Kampung Wisata Tablanusu. Dilanjutkan dengan program pelatihan selam di tingkat lanjutan dan tingkat *rescue*. Pelatihan sapta pesona dan pelatihan kuliner daerah merupakan program yang dirancang di akhir tahun 2014 yang bertujuan untuk menjaga lingkungan serta unsur-unsur sapta pesona, selain itu pelatihan kuliner yang dilaksanakan merupakan pelatihan yang memberikan pengetahuan kepada ibu rumah tangga tentang kuliner daerah. Pelatihan ini didasarkan pada peluang usaha yang dinilai

oleh pemerintah bahwa kuliner daerah khususnya di Papua dapat memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat.

Kuliner tradisional khas Papua yang tersedia di Kampung Tablanusu seperti papeda dan sate ulat sagu merupakan jenis makanan yang dijual dan banyak diminati oleh wisatawan karena citra rasanya yang nikmat. Jenis makanan papeda dan sate ulat sagu dijual oleh masyarakat lokal di sekitar kawasan pantai Tablanusu. Bentuk partisipasi masyarakat yang menjual kuliner selain menambah jumlah penghasilan masyarakat tujuan lainnya yaitu sebagai bentuk pelestarian makanan tradisional khas Papua.

Tabel 2. Program-program Pengembangan Kampung Tablanusu

No.	Program-Program Pengembangan Kampung Tablanusu	Waktu
1	Gotong royong Jumat bersih	Pukul 06.00-11.00 WIT
2	Program pembuatan keramba ikan bandeng	Tahun 2000
3	Program pembuatan sero apung	Tahun 2000
4	Program pembuatan keramba apung	Tahun 2002
5	Program pembuatan Sasi (<i>Tiyatiki</i>)	Turun temurun
6	Program pembuatan tanggul pemecah ombak	Tahun 2012

Sumber: Hasil Observasi Palimbunga (2015)

Program-program pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu yang dirancang oleh pihak pemerintah yang bekerjasama dengan pihak pengelola, aparat Kampung dan segenap masyarakat Tablanusu terdiri dari: Gotong royong Jumat bersih yang dilaksanakan setiap hari jumat mulai pukul 06.00-11.00 WIT, program pembuatan keramba ikan bandeng pada tahun 2000, program pembuatan sero apung tahun 2000, program pembuatan keramba apung tahun 2002, program pembuatan *Sasi (Tiyatiki)* yang dilaksanakan secara turun temurun dan program pembuatan tanggul pemecah ombak yang dirancang pada tahun 2012.

Gotong Royong Jumat Bersih

Kegiatan yang dilaksanakan dari pukul 06.00-11.00 dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa. Masyarakat tampak aktif menjalankan aktivitas ini bukan hanya sebagai satu rutinitas di desa, tetapi masyarakat lokal sadar bahwa kebersihan dan kenyamanan serta keindahan alam di desa mereka adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga agar tetap berkelanjutan sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Gotong royong sebagai salah satu program yang dirancang oleh pihak aparat desa dengan masyarakat lokal Desa Tablanusu memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Fungsi partisipasi masyarakat dalam menjalankan program gotong royong ini yaitu memberikan tanggung jawab bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal mereka. Upaya gotong royong ini selain memelihara rasa solidaritas antara sesama masyarakat juga merupakan perwujudan dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Program Pembuatan Keramba Ikan Bandeng

Program pembuatan keramba ikan bandeng merupakan suatu program yang diupayakan menjadi salah satu program yang dapat mensejahterakan masyarakat lokal. Pembuatan keramba ikan bandeng yang dimulai pada tahun 2000 dinilai cukup membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan. Keramba ikan yang dikelola oleh masyarakat untuk budidaya ikan nila dan bandeng ini ditekuni masyarakat Desa Tablanusu hingga saat ini. Berkembangnya program ini kemudian menjadi sumber mata pencaharian sampingan bagi masyarakat lokal selain berkebun dan mencari ikan di laut. Program pembuatan keramba ikan bandeng ini selain melatih masyarakat untuk memelihara ikan, masyarakat juga memperoleh nilai komersil dari upaya memelihara ikan di keramba.

Program Pembuatan Sero Apung

Sero apung adalah alat tangkap pasif tradisional yang berupa penangkap ikan terbuat dari kayu, kawat, jaring dan plastik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga ikan yang masuk tidak akan keluar. Sistem pengoperasiannya dilakukan dilepas pantai untuk menangkap ikan, kepiting, udang yang mencapai kedalaman 15m-20m. Program ini dinilai cukup membantu masyarakat lokal yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan.

Program Pembuatan Keramba Apung

Program pembuatan keramba apung yang didanai oleh Departemen Tenaga Kerja yaitu suatu program yang dilaksanakan pada Tahun 2002. Budidaya ikan dengan keramba apung dilakukan di kawasan danau Kampung Tablanusu. Program yang dianggap sebagai media untuk budidaya ikan nila, bandeng dan mujair yang efisien dan efektif. Model sistem budidaya ini terbukti efisien, baik efisien secara teknis maupun ekonomis. Di telaga air payau ini, wisatawan dapat membeli hasil budidaya warga setempat berupa ikan bandeng, nila, dan mujair. Setiap 1 kilogram mujair harganya Rp 25.000, sedangkan bandeng dan nila dibeli per 2 ekor seharga Rp 20.000.

Program Pembuatan Sasi (Tiyatiki)

Sebuah program yang dirancang berkaitan dengan peraturan adat yang berlaku di masyarakat adat *Tepra O Nusu* (Tablanusu). Peraturan ini membahas tentang pelarangan pencarian ikan di laut pada bulan-bulan tertentu di wilayah adat Kampung Tablanusu. Dalam bahasa daerah *Tepra O Nusu* (Tablanusu) disebut dengan *ritual sasi dan ritual tiyatiki*. Ritual *tiyatiki* merupakan salah satu ritual adat yang berlaku dan tetap dijalankan dari nenek moyang hingga saat ini. Upaya ini dilakukan juga untuk mendukung adanya konservasi lingkungan karena daerah konservasi di Kampung Tablanusu berada di laut yang memiliki potensi yang beragam.

Program Pembuatan Tanggul Pemecah Ombak

Program pembuatan tanggul pemecah ombak merupakan salah satu program pemerintah guna mencegah abrasi pantai di Tablanusu. Pemecah gelombang atau dikenal sebagai juga sebagai pemecah ombak adalah prasarana yang dibangun untuk memecahkan ombak, dengan menyerap sebagian energi gelombang. Tanggul ini berfungsi untuk melindungi pantai yang terletak dibelakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan erosi pada pantai. Struktur pemecah ombak yang dibangun di pantai sebagai bagian dari pertahanan pantai atau untuk melindungi kawasan pantai dari pengaruh cuaca, ombak, ataupun sedimentasi (umumnya pasir tetapi juga dapat terdiri dari sedimen

kasar seperti kerikil dan lain-lain). Alat Pemecah ombak dimaksudkan untuk mengurangi intensitas ombak di perairan dekat pantai sehingga dengan demikian dapat mengurangi erosi dan abrasi pantai.

Bentuk partisipasi masyarakat terkait dengan pengembangan di Kampung Tablanusu terbagi menjadi dua yaitu partisipasi masyarakat dalam program-program yang didukung oleh pihak pemerintah dan aparat desa dan partisipasi masyarakat di sektor informal. Menurut Effendi sektor informal di Indonesia telah dirumuskan dengan ciri-ciri pokok yang bersifat kualitatif yaitu: (1) teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional, (2) modal dan putaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, (3) pendidikan yang dipergunakan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman kerja (magang), (4) pada umumnya unit usaha termasuk golongan *oneman enter prise* dan tenaga kerja dari keluarga, dan (5) hasil produksi atau jasa, terutama dikonsumsi oleh golongan tertentu yaitu masyarakat kota atau wisatawan (Effendi, 1998).

Menurut Manning (1991) bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah usaha sendiri, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum. Mereka adalah kumpulan pedagang, pekerja yang tidak terikat dan pekerja yang memiliki pendapatan tidak tetap.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tentang Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Papua: Kajian Parawisata Budaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, bentuk partisipasi berupa keterlibatan masyarakat yang dimulai dari proses awal perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap program pengembangan pariwisata di Kampung Tablanusu. Partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu partisipasi masyarakat terkait dengan program-program di dukung oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dan partisipasi masyarakat dalam sektor informal. *Kedua*, Program yang dirancang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dengan kesepakatan masyarakat lokal Kampung Tablanusu adalah program sosialisasi sadar wisata, pelatihan pemandu wisata terpadu bagi pemuda pemudi di Kampung Tablanusu. Pelatihan pemandu wisata yang diikuti oleh pemuda-pemudi dari Kampung Tablanusu bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menciptakan lapangan kerja baru dibidang pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Profil Desa Wisata Tablanusu, Distrik Depapre: Kabupaten Jayapura*. Monograf tak terbit.
- Arnstein, S.R. 1969. *A Ladder Citizen Participation*. Tersedia pada: <http://litgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html> diakses pada 30 Maret 2016.
- Janejc, 2009. Perencanaan Transportasi. Diakses 21 Februari 2015. Tersedia pada: <https://jane4jc.wordpress.com/>.
- Kompasiana, 2012. Perkembangan Pembangunan di Papua. Diakses 21 Februari 2015. Tersedia pada: <http://regional.kompasiana.com/2012/08/03/perkembangan-pembangunan-di-papua-482321.html>.

- Nasikun. 1997. Model Pariwisata Pedesaan. *Permodelan Pariwisata Pedesaan untuk Membangun Pedesaan yang berkelanjutan*. Bandung: ITB
- Natori, Masahiko. 2001. *A Guidebook for Tourism-Based Community Development*. APTEC: Japan.
- Pitana, I Gde. 1999a. “A Community Management dalam Pembangunan Pariwisata” *Majalah Ilmiah Pariwisata- Analisis Pariwisata* Vol. 2. Program Studi Pariwisata. Universitas Udayana.
- Pitana, I Gde. 1999b. *Pelangi Pariwisata Bali: Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisata Bali di Penghujung Abad*. Denpasar: Bali Post.
- Sedarmayanti. 2005. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata (Bunga Rumpai Tulisan Pariwisata)*, Bandung: Bandar Maju.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soemarmo, 2005. Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik). (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pemerintah Republik Indonesia.
- Wardiyanto & M Baiquni. 2010. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Lubuk Agung.
- Yarisetouw, Benyamin. 2012. “Strategi Perencanaan Desa Tablanusu Distrik Depapre Sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua”. (Tesis). Denpasar: Universitas Udayana.